

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Maret 2021/Khusus - Awal Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTAHANAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DONNY ERMAWAN T.**
2. Jabatan : **SEKRETARIS JENDERAL**
3. NHK : **252042**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 5.582.662.500**

1. Tanah Seluas 2240 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. Tanah Seluas 1852 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
3. Tanah Seluas 658 m2 di KAB / KOTA PURBALINGGA, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000
4. Tanah Seluas 202 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
5. Tanah Seluas 833 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
6. Tanah Seluas 1369 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
7. Tanah Seluas 1885 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
8. Tanah Seluas 2720 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
9. Tanah Seluas 2720 m2 di KAB / KOTA SUBANG, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
10. Tanah Seluas 7191 m2 di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
11. Tanah Seluas 395 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.728.000.000
12. Tanah dan Bangunan Seluas 617 m2/187 m2 di KAB / KOTA



SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.454.662.500

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 110.000.0001. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2009, HASIL
SENDIRI Rp. 110.000.000**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. 880.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 686.968.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 2.273.989.185**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 9.533.619.685**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 9.533.619.685

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.